



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 20 Februari 2017

Halaman: 2

REGULASI MASIH PROSES FINALISASI Pengentasan Kawasan Kumuh Semakin Terukur

YOGYA (KR) - Pengentasan kawasan kumuh di Kota Yogya akan semakin terukur seiring adanya regulasi yang menaungi program tersebut. Hanya, regulasi berupa peraturan daerah (perda) itu saat ini masih dalam proses finalisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM yang difasilitasi oleh Biro Hukum DIY.

Penyusunan perda terkait penataan kawasan kumuh di Kota Yogya sebelumnya mendapatkan pendampingan khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Selain Kota Yogya sebenarnya ada beberapa kota lain yang turut memper-

oleh pendampingan. Seperti Solo, Bogor, Bangka Belitung serta kota di Kalimantan," terang Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Kawasan Permukiman dan Perumahan Kota Yogya, Hendra Tantular, Minggu (19/2).

Landasan utama regulasi tersebut, terang Hendra, agar masyarakat yang berada di kawasan kumuh dapat memperoleh hak. Namun di sisi lain, kewajiban juga harus ditaati. Dicontohkannya kelompok masyarakat yang menempati area pinggir sungai dan masuk dalam kawasan larangan hunian, maka berhak atas informasi.

"Ketika kelompok itu rela

memundurkan hunian, maka apa yang harus diperoleh sebagai konsekuensinya pun bakal dipenuhi," imbuhnya.

Di samping itu, fungsi

perda juga dapat dijadikan acuan bagi setiap pihak yang hendak melakukan penataan kawasan kumuh. Terutama menyangkut pendekatan yang dilakukan serta kewenangan yang diperbolehkan. Selain itu, adanya perda juga dapat memudahkan pemerintah pusat dalam mengucurkan bantuan maupun program ke daerah.

Hendra memaparkan, di Kota Yogya ada sekitar 8,6 persen dari seluruh wilayah yang termasuk kawasan kumuh. Totalnya mencapai 278 hektare serta sudah diatur dalam SK Walikota Yogya No 393/2011 yang tersebar di 13 kecamatan, 35 kelurahan dan 206 RW.

"Kebetulan sebagian besar kawasan itu ada di bantaran sungai. Makanya sasaran utama penataan berada di sana," urainya.

Terkait bantuan dari pemerintah pusat, diakuinya sangat mendukung target di daerah. Seperti pada 2015 lalu, Kota Yogya mendapat kucuran dana Rp 15,5 miliar namun yang mampu terserap sekitar Rp 8,5 miliar. Kemudian pada 2016, ada alokasi Rp 27 miliar yang dikerjakan oleh satuan kerja (satker) di DIY. Sedangkan tahun ini, bantuan akan diprioritaskan bagi daerah yang sudah memiliki perda pengentasan kawasan kumuh.

(Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005